

# OMBUDSMAN PANTAU PELAYANAN PENDIDIKAN DI DAERAH MARJINAL

Kamis, 02 Agustus 2018 - Haikal Akbar

Jakarta - Ombudsman RI prihatin dengan kondisi fasilitas jalan, juga fasilitas pendidikan lainnya. Terutama fasilitas pendidikan di daerah marginal yang digunakan anak-anak didik untuk pergi ke sekolah. Seperti yang diberitakan Detik.com tanggal 1 Agustus 2018, setiap hari belasan pelajar Madrasah Ibtidaiyah (MI) dari Kampung Pasirkopo RT 04/06, Desa Wangunreja, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi, Jawa Barat harus menempuh jarak sekitar 1,5 kilometer untuk tiba di Kampung Pasir Kandel, Desa Sukamaju tempat sekolah mereka berada. Pulang pergi total mereka menempuh jarak sejauh 3 kilometer, nihilnya infrastruktur jembatan tidak menyurutkan semangat mereka bersekolah. Ketika air sungai meluap, mereka terpaksa meliburkan diri atau nekat melewati arus air yang berbahaya .

Ahmad Suaedy, Anggota Ombudsman RI, mengatakan pemerintah wajib memprioritaskan dan memberi afirmasi kepada daerah-daerah yang sangat tertinggal seperti di Desa Wangunrejo Kabupaten Sukabumi tersebut. Wujud prioritas dan afirmasi tersebut dapat dilakukan dengan pemberian anggaran di luar anggaran reguler Dana Desa dan APBD .

"Pemerintah harus menyediakan anggaran khusus untuk daerah marginal seperti itu sebagai kebijakan afirmasi di luar anggaran reguler seperti Dana Desa maupun APBD. Terutama untuk pendidikan termasuk jalan ke sekolah seperti jembatan, dan untuk meningkatkan ekonomi rakyat," jelas Suaedy

Suaedy juga menambahkan, situasi seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi terjadi di daerah yang lokasinya dekat dengan Jakarta. "Bagaimana dengan daerah-daerah yang lokasinya di luar Pulau Jawa dan daerah yang memang wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal," ujarnya.

Jika pemerintah mengabaikan masalah-masalah yang seperti ini, lanjutnya, akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah, maka ini harus segera diatasi. Melalui program pemantauan peningkatan pelayanan publik kepada daerah dan kelompok marginal, Ombudsman RI sedang memberikan perhatian khusus dan melakukan pemantauan terhadap daerah-daerah tersebut. "Daerah Jawa bagian selatan ini salah satu prioritas pengawasan kami. Di samping daerah-daerah 3T lainnya," tutup Suaedy. (JF)